



Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2019

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkal Pinang, 5 April 2018**

1 Pencapaian Pembangunan Nasional

2 Sasaran Ekonomi Makro

3 Pokok-Pokok RKP 2019

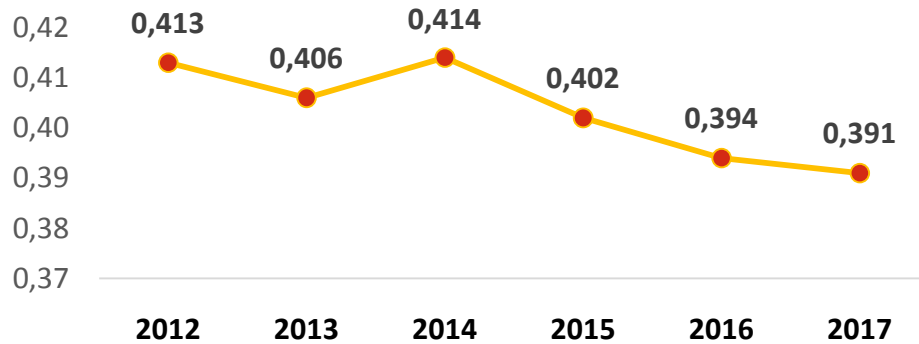
4 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1

Pencapaian Pembangunan Nasional

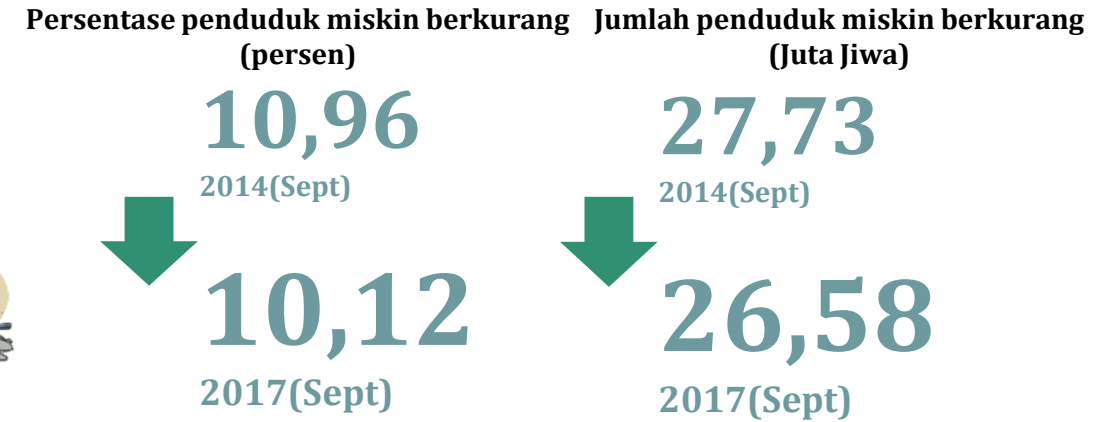
Pemerataan pembangunan menunjukkan perkembangan positif

Ketimpangan menurun ditandai oleh koefisien gini yang semakin membaik

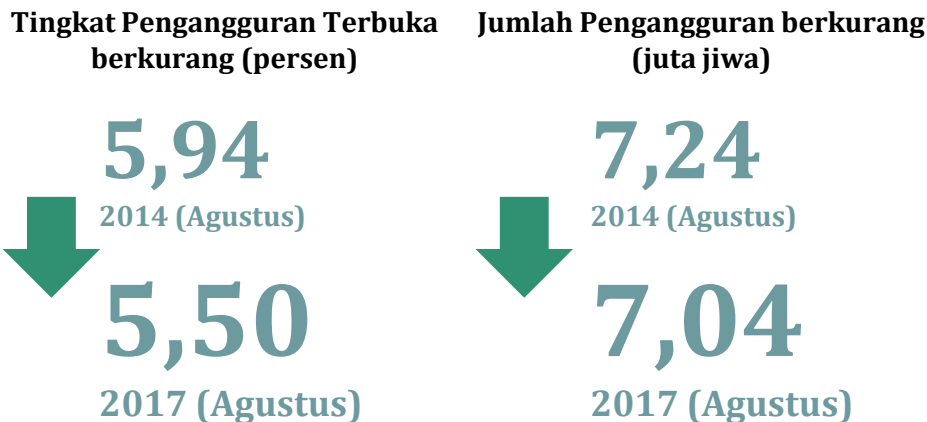


Sumber: Susenas, September 2012-2017

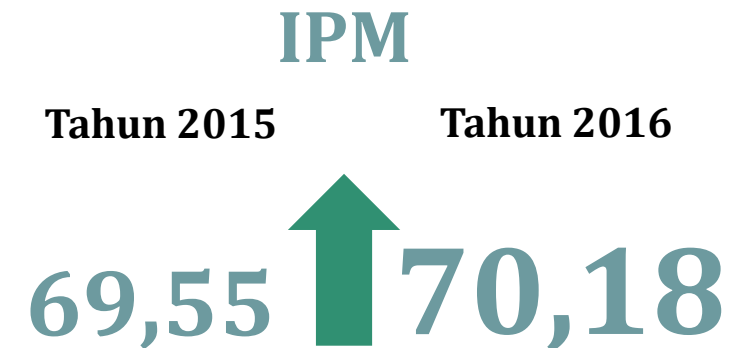
Tingkat **kemiskinan menurun**, menjadi 10,12 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.



Tingkat **pengangguran menurun** menjadi 5,50 persen dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang.



Indeks Pembangunan Manusia membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016.



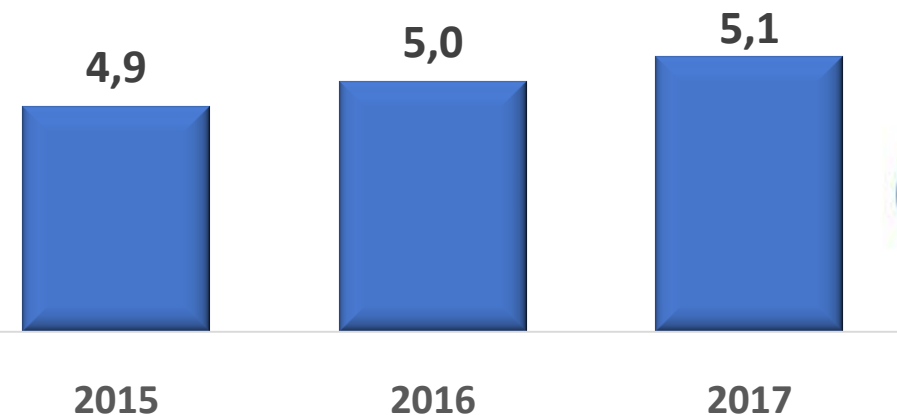
Sumber: BPS 2014-2017

Komponen	2016	2017				2017
		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	5,01	4,94	4,95	4,93	4,97	4,95
Konsumsi LNPR	6,64	8,07	8,52	6,02	5,24	6,91
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	2,14
PMTB	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	6,15
Ekspor	-1,57	8,41	2,80	17,01	8,50	9,09
Impor	-2,45	4,81	0,20	15,46	11,81	8,06
Pertumbuhan Sektor						
Pertanian	3,36	7,15	3,23	2,77	2,44	3,81
Pertambangan	0,95	-1,22	2,12	1,84	0,08	0,69
Industri	4,26	4,28	3,50	4,85	4,46	4,27
Industri Non Migas	4,43	4,80	3,93	5,46	5,14	4,84
Perdagangan	4,03	4,61	3,47	5,20	4,47	4,44
Transportasi & Pergudangan	7,45	8,06	8,80	8,88	8,21	8,49
Informasi dan Komunikasi	8,88	10,48	11,06	8,82	8,99	9,81
Jasa Keuangan & Asuransi	8,90	5,99	5,94	6,16	3,85	5,48
PDB	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah kembali

- Konsumsi rumah tangga di Q4-2017 membaik, walaupun masih sedikit di bawah 5,0%. Faktor penyebabnya:
 - ✓ **Smart consumers**: masyarakat Indonesia lebih memilih dalam berbelanja yang seperlunya.
 - ✓ **Leisure consumers**: lebih menyenangi aktivitas terkait rekreasi.
 - ✓ **Saving behavior**: lebih banyak menabung terutama kelompok menengah ke atas.
- Industri non-migas dalam dua kuartal terakhir tumbuh cukup baik (Q3 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional).

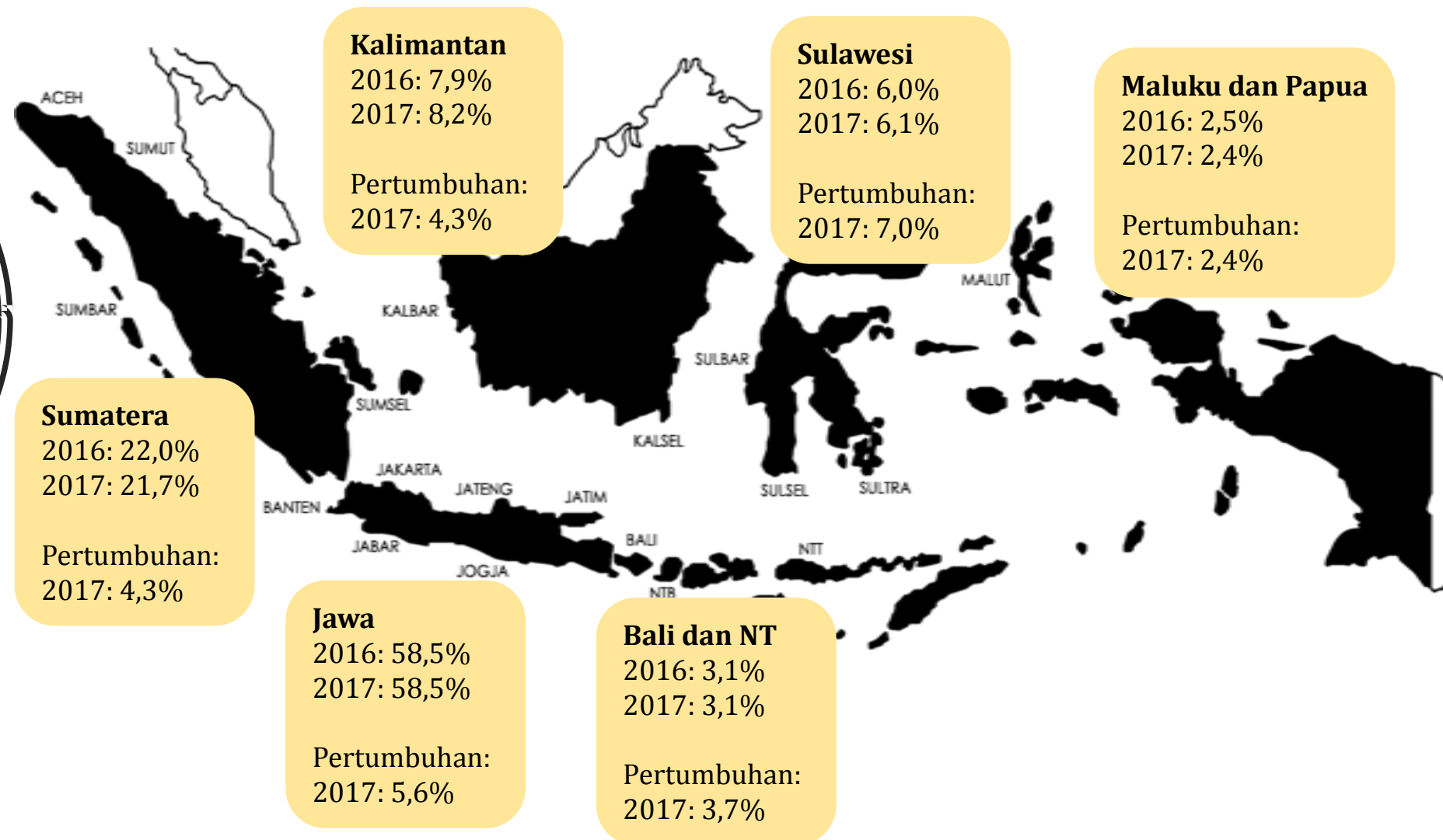
Pertumbuhan Ekonomi (Persen, YoY)



Sumber: BPS (diolah)

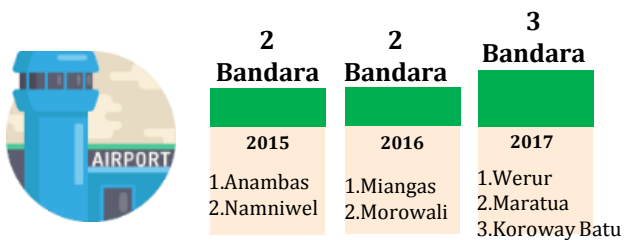
KONTRIBUSI PDRB PULAU TERHADAP PDB NASIONAL

**Sebaran
Ekonomi
Wilayah Sedikit
Bergeser
ke Arah
Kawasan Timur
Indonesia**

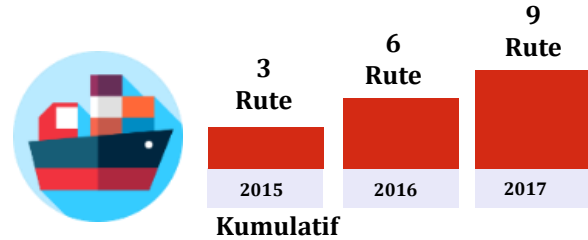


Infrastruktur konektivitas untuk pemerataan antar wilayah

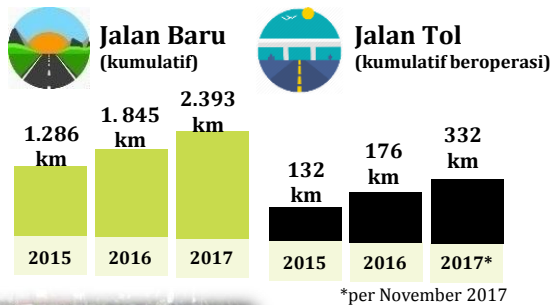
Pembangunan Bandara Baru



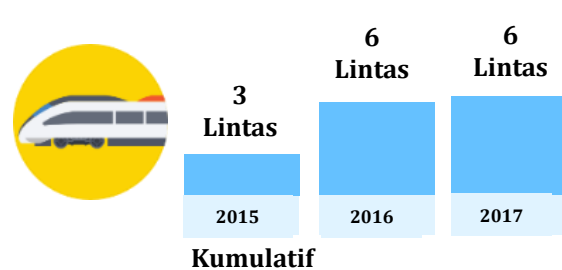
Pengembangan Angkutan Barang Bersubsidi Tol Laut



Pembangunan Jalan Baru dan Jalan Tol



Penyediaan Lintasan Kereta Api Perintis



Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dari 61 (2013/2014) ke 52 (2017/2018)

Sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2017-2018

Ketersediaan Energi Dan Pembangunan Pita Lebar Daerah Terpencil

Rasio Elektrifikasi (Persen)

2017 95,35

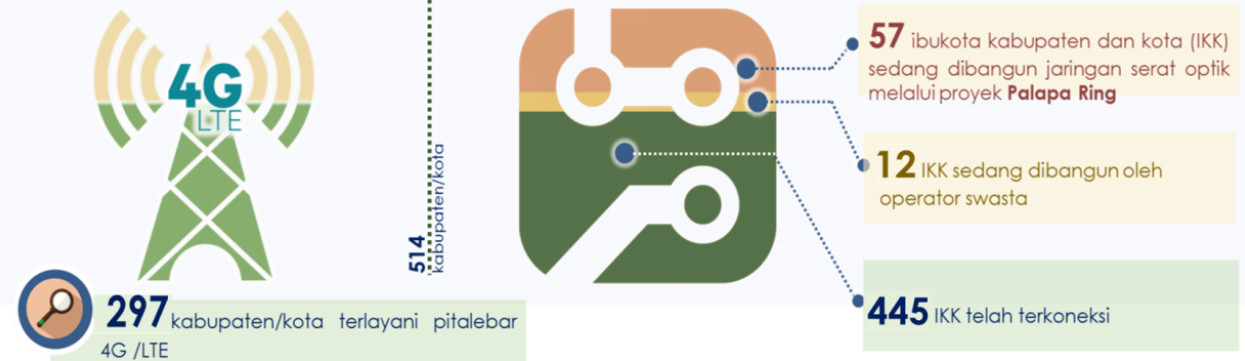
Kapasitas Pembangkit (GW)

2017 60,49

Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

2017 1.011,5

Keterangan: Angka Kumulatif

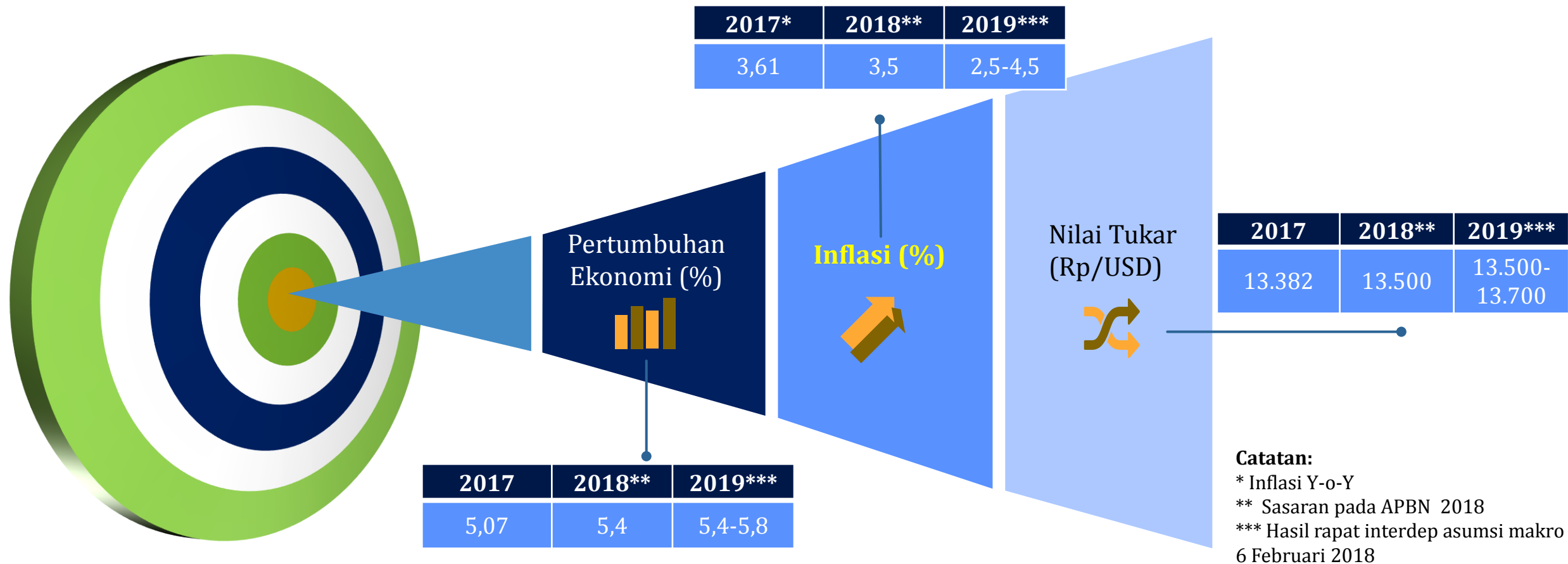


2

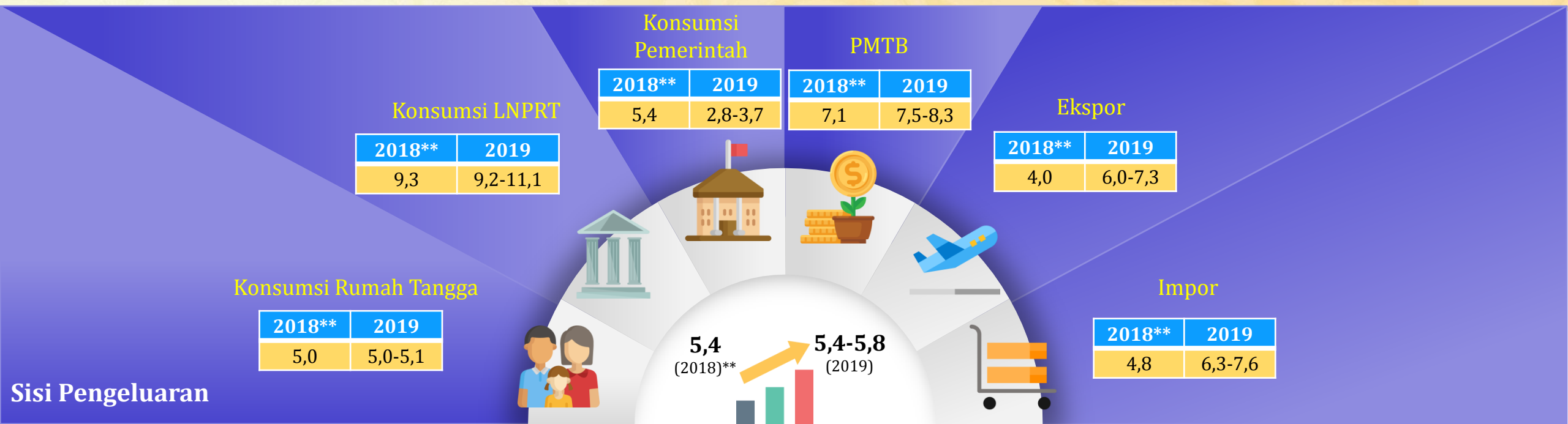
Sasaran Ekonomi Makro

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019

- Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
- **Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.**
- Pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.



Outlook dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sisi Pengeluaran dan Sisi Produksi



Sisi Lapangan Usaha

Investasi dan konsumsi rumah tangga diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran

	2018**	2019
Pertambangan	0,4	0,8
Listrik	3,4	6,2-6,6
Konstruksi	6,9	6,9-7,2

Pertanian

	2018**	2019
	4,0	3,9-4,1

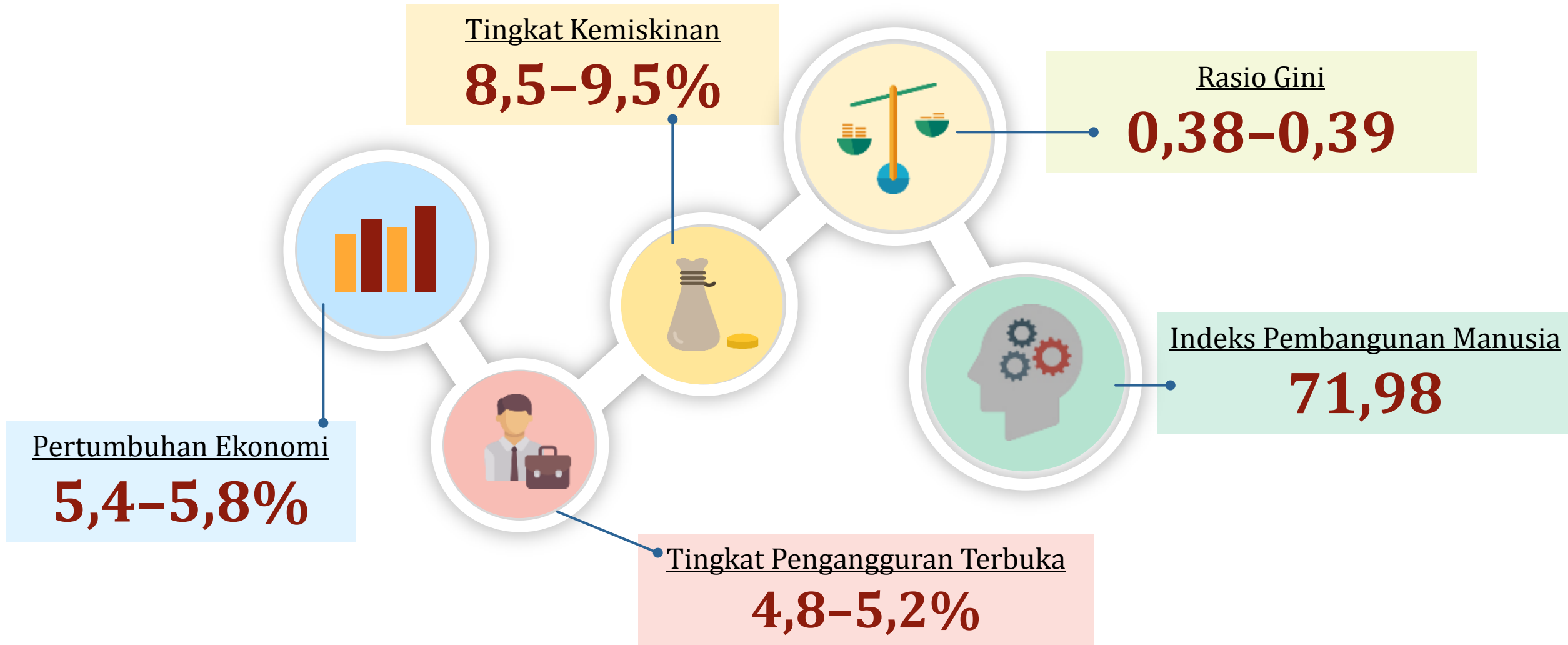
Industri Pengolahan

	2018**	2019
	5,1	5,1-5,6

Perdagangan

	2018**	2019
	6,1	5,4-6,0

	2018**	2019
Infokom	11,0	10,7-11,3
Jasa Keuangan	7,8	8,1-8,7
Transportasi	8,9	8,6-9,0



3

Pokok-Pokok RKP 2019



**Menajamkan
Prioritas Nasional**

2018

10 PN



2019

5 PN

**Memastikan
Pelaksanaan
Program**

30 PP



24 PP

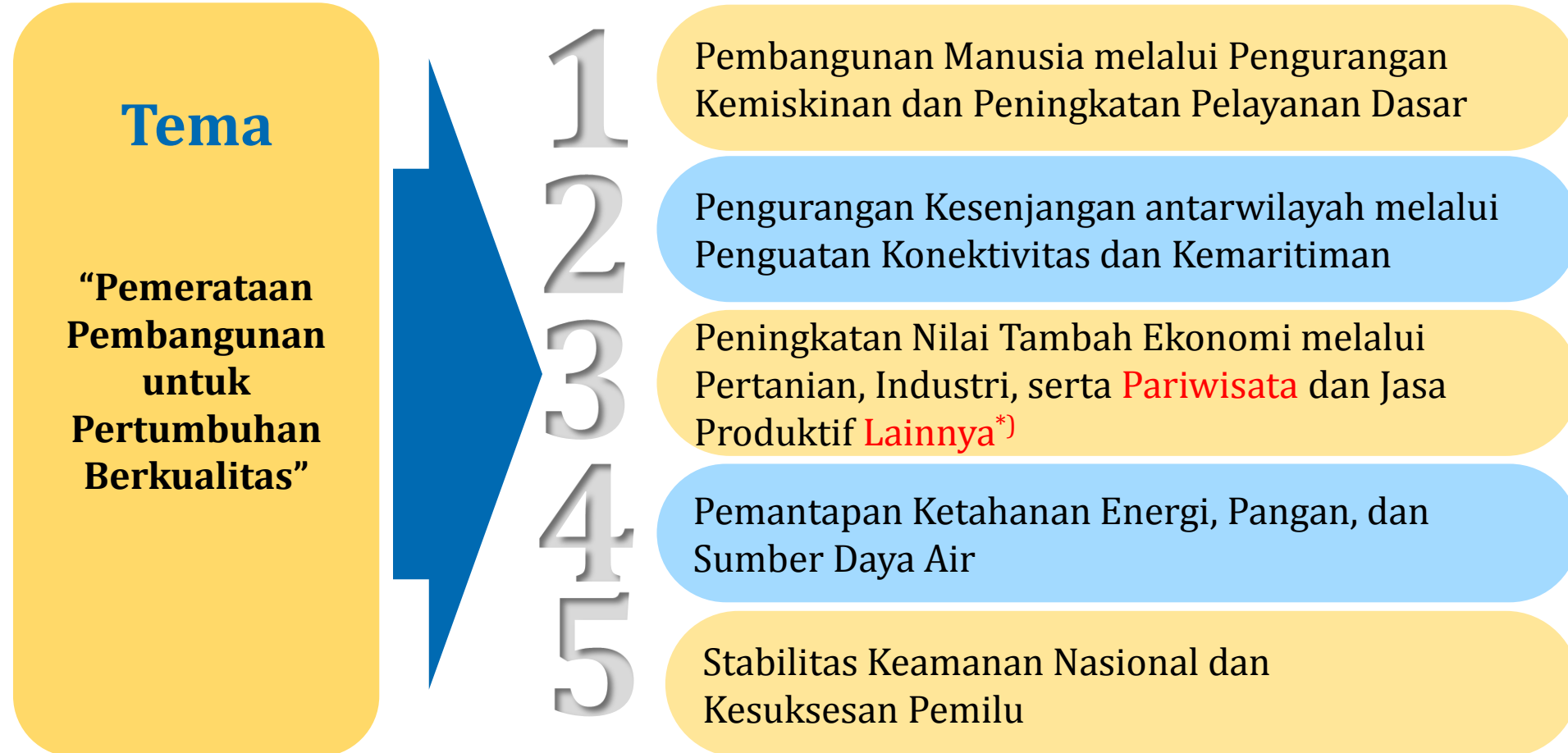
**Pengendalian Dilakukan
Sampai ke Level Proyek
(satuan 3)**

**Menajamkan
Integrasi
Sumber Pendanaan**

**Belanja K/L, Belanja Non
K/L, Belanja Transfer ke
Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan
Swasta**

2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.



Catatan:

*) Akan disesuaikan apabila sektor Pariwisata menjadi sektor unggulan: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi, Industri, serta **Pariwisata** dan Jasa Produktif **Lainnya**



Lambatnya penurunan angka kemiskinan



Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar



Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan

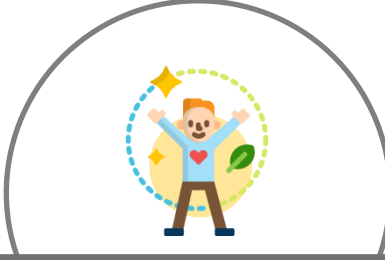
PRIORITAS NASIONAL 1



PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

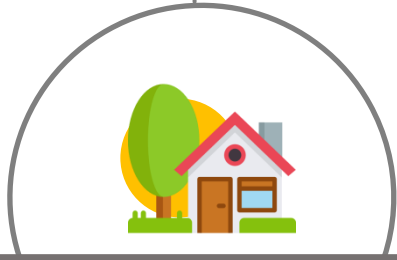
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

● Percepatan Penurunan *Stunting*



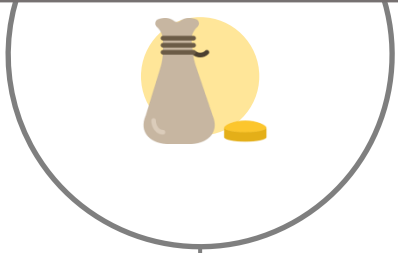
4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

● Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Air Minum, dan Sanitasi Layak



1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan

● Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran



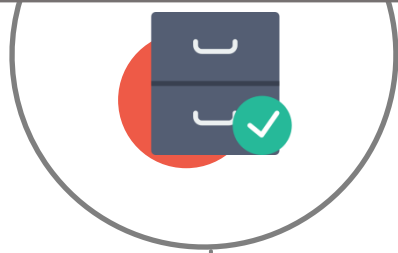
3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

● Penyediaan Afirmasi Pendidikan



5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

● Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil



PN
 PP
 KP



Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan



Tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat



Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan



Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana



Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan

PRIORITAS NASIONAL 2

2 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

- Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antar Kabupaten/ Kota dan Kampung



4 Penanggulangan Bencana

- Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana



PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN



1 Peningkatan Konektivitas dan TIK

- Pengembangan Pelabuhan *Hub* dan *Feeder* Jalur Utama dan Subsidi Tol Laut



3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan



5 Peningkatan Sistem Logistik

- Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian



PN



PP



KP

Isu Strategis Prioritas Nasional 3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, **serta Pariwisata** dan Jasa Produktif **Lainnya**



Rendahnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan



Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja



Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri



Rendahnya pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah



Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif

PRIORITAS NASIONAL 3

2 Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

● Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik



4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

● Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi



PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, SERTA PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA



1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

● Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan



3 Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

● Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata, 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan



5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

● Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier



PN



PP



KP

Isu Strategis Prioritas Nasional 4

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air



Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat



Harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif dan cenderung meningkat



Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri

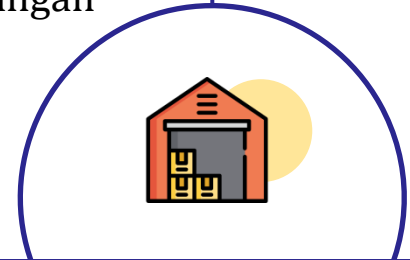


Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi

PRIORITAS NASIONAL 4

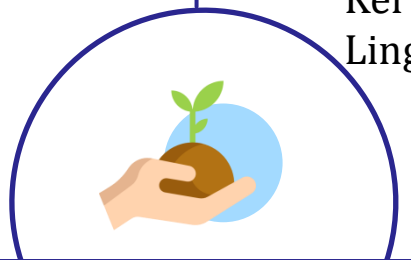
2 Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

● Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan



4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

● Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup



PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR

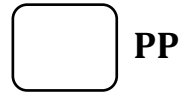


1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

● Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

● Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem



Isu Strategis Prioritas Nasional 5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu



Tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional



Kerawanan pelaksanaan PEMILU dan netralitas ASN



Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara



Belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi



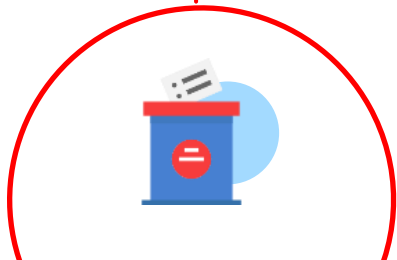
Perlunya penguatan diplomasi yang efektif

PRIORITAS NASIONAL 5

STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU

2 Kesuksesan Pemilu

● Pengamanan Pemilu



4 Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

● Integrasi *e-Government*



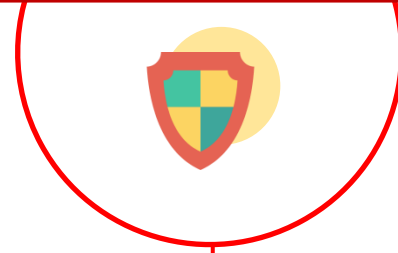
1 Kamtibmas dan Keamanan Siber

● Penguatan Kelembagaan Siber serta Keamanan Ruang Siber



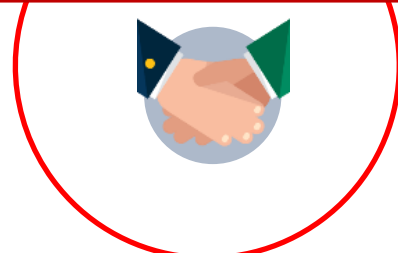
3 Pertahanan Wilayah Nasional

● Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara



5 Efektivitas Diplomasi

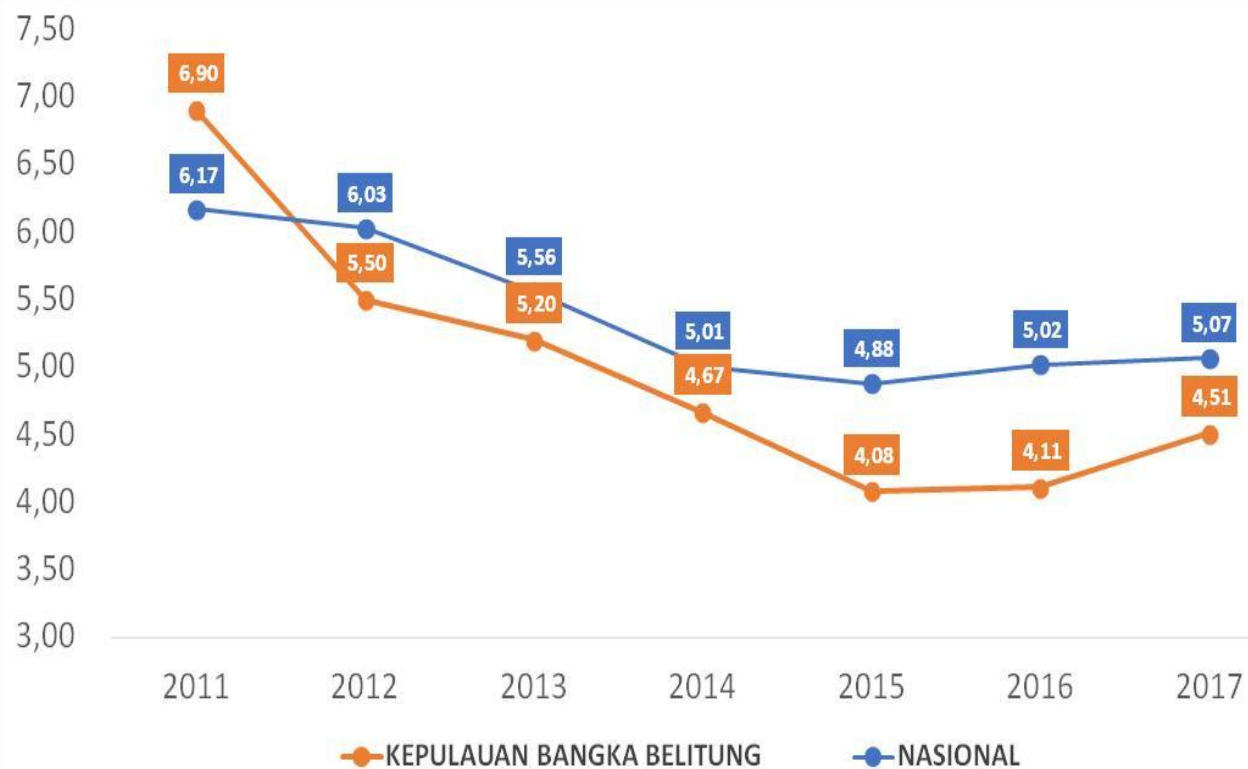
● Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional



4

Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011-2017



Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012-2017



Sumber utama pendorong pertumbuhan ekonomi:

- Sektor Pertanian
- Sektor Kontruksi
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Perdagangan besar dan eceran

Share Ekonomi Provinsi Terhadap Pulau dan Nasional

Rata-Rata Share Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011-2017



Terhadap
Pulau Sumatera
2,31 %

Share Terbesar
9

Dari 10 Provinsi di
Pulau Sumatera



Terhadap Nasional
0,52 %

Share Terbesar
28

Dari 34 Provinsi
secara Nasional

2

Kab. Bangka
18,28 %

1

Kab. Bangka Barat
19,01 %

3

Kota Pangkal Pinang
16,85 %

SHARE
KABUPATEN / KOTA **3** TERBESAR TAHUN 2016

TERENDAH: Belitung Timur 10,14 %

22,13 %

19,04 %

14,15 %

2

Pertanian, Kehutan
an, dan Perikanan

1

Industri
Pengolahan

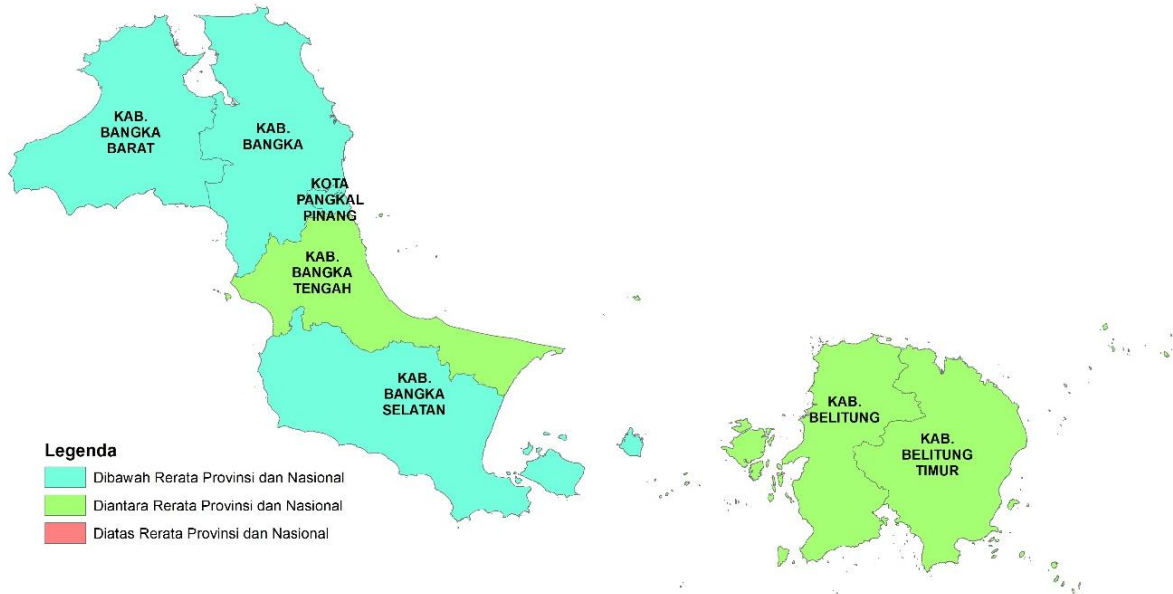
3

Perdagangan Besar
dan Eceran

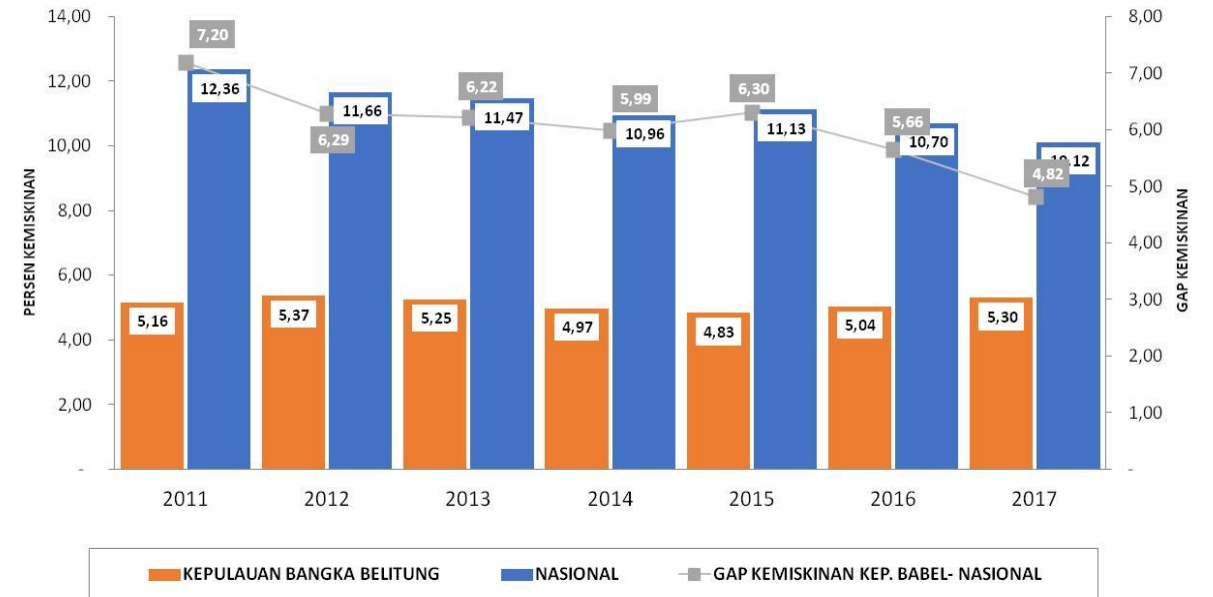
3 SEKTOR DENGAN RATA-RATA SHARE TERBESAR
TAHUN 2012 S/D 2017

Tingkat Kemiskinan Provinsi berada dibawah rata-rata Nasional

Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin 2017



Angka Kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2011 – 2017 (September)



Angka Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rendah dan berada jauh dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun mengalami sedikit peningkatan dalam tujuh tahun terakhir.

Secara Spasial angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2017 (Maret) terdapat di Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Tengah, sedangkan terendah di Kab. Bangka Barat 2,98 %

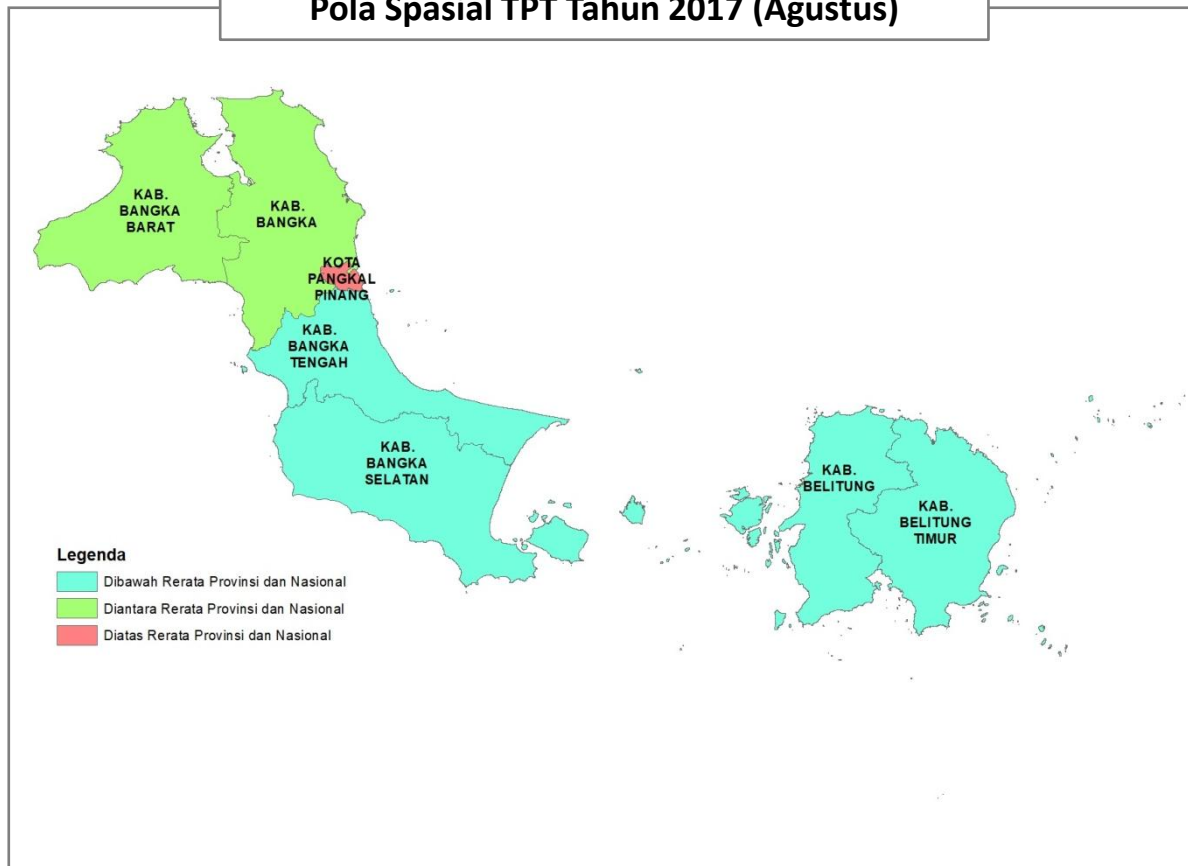
2
Kab. Belitung Timur
6,81 %

1
Kab. Belitung
7,77 %

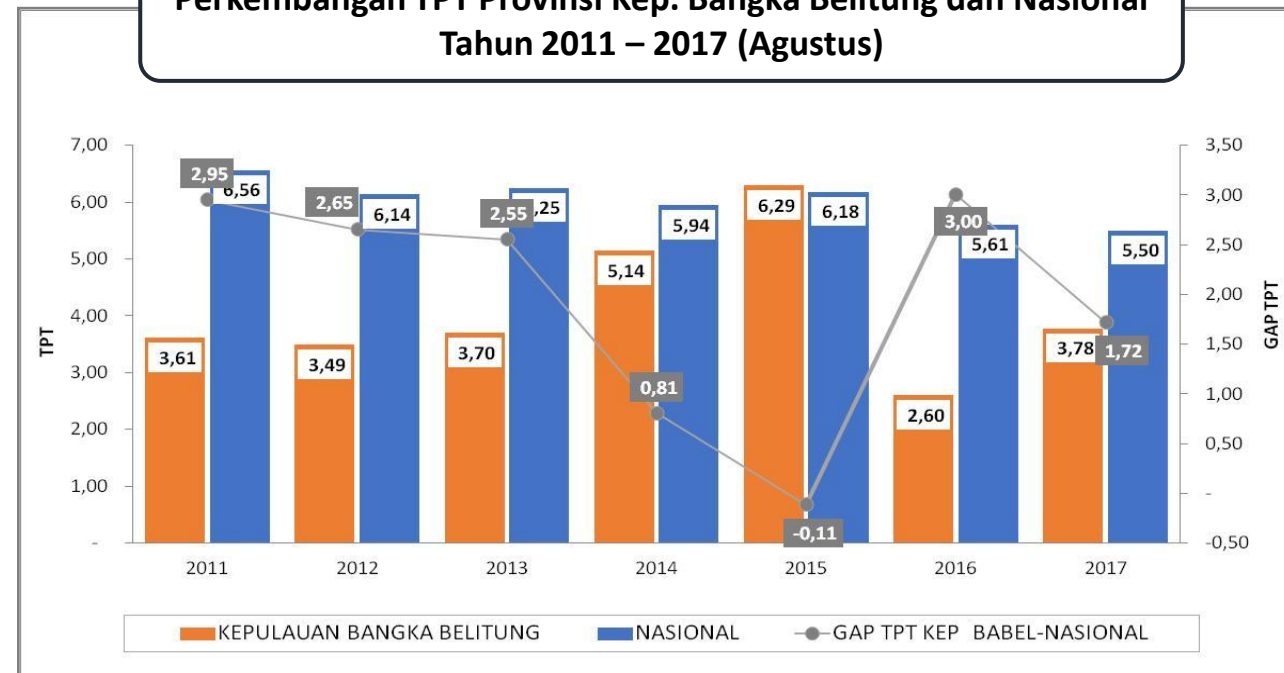
3
Kab. Bangka Tengah
6,07%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pola Spasial TPT Tahun 2017 (Agustus)



Perkembangan TPT Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2011 – 2017 (Agustus)



TPT Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi, namun secara umum TPT provinsi berada dibawah rata-rata TPT nasional.

Secara Spasial, TPT tertinggi pada tahun 2017 (Agustus) terdapat di Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka, dan Kab. Bangka Barat, sedangkan TPT terendah di Kab. Belitung 2,57 %

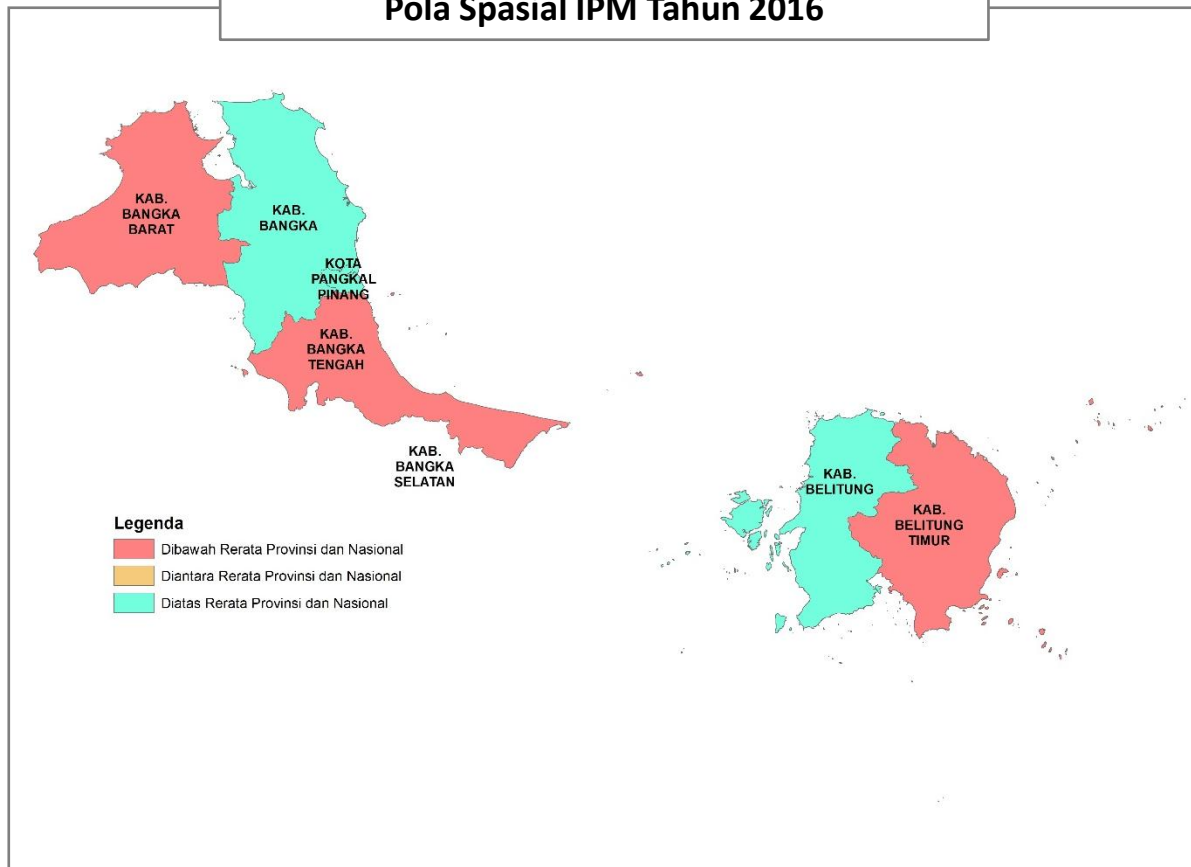
2
Kab. Bangka
4,29 %

1
Kota
Pangkal Pinang
5,80 %

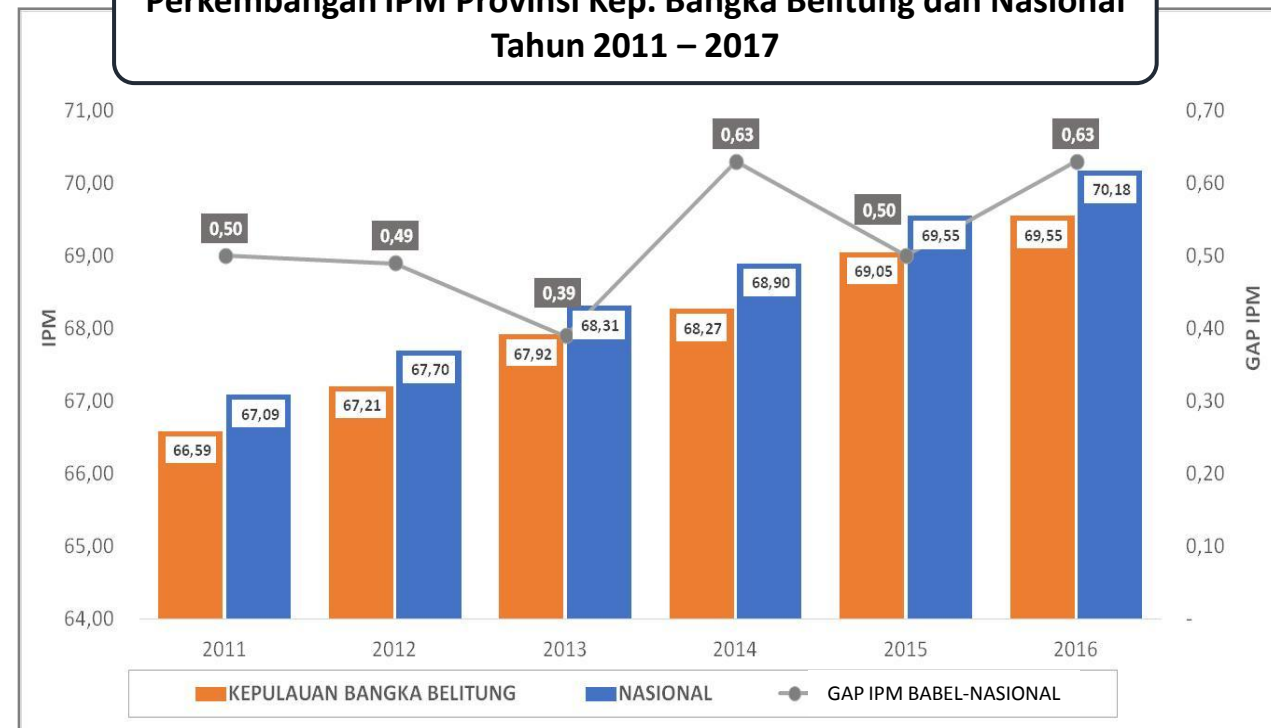
3
Kab. Bangka Barat
4,23 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pola Spasial IPM Tahun 2016



Perkembangan IPM Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2011 – 2017



IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dibawah angka IPM nasional. Meskipun setiap tahun meningkat namun nilai gap dengan IPM nasional juga meningkat, yang berarti kenaikan IPM Kep. Bangka Belitung lebih lambat dibandingkan IPM Nasional

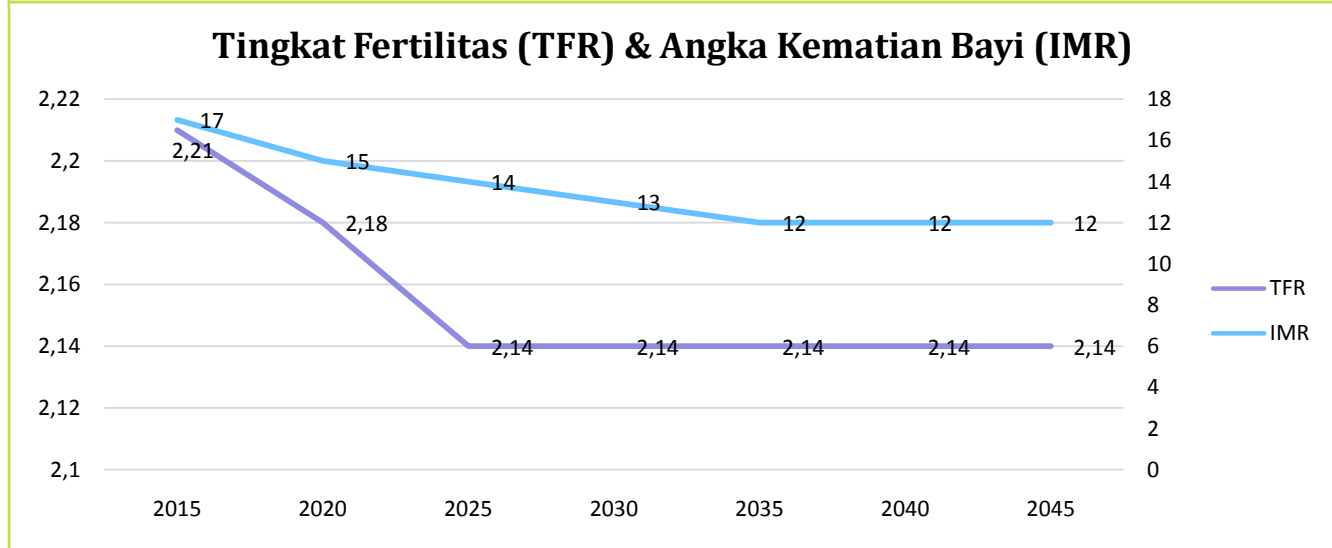
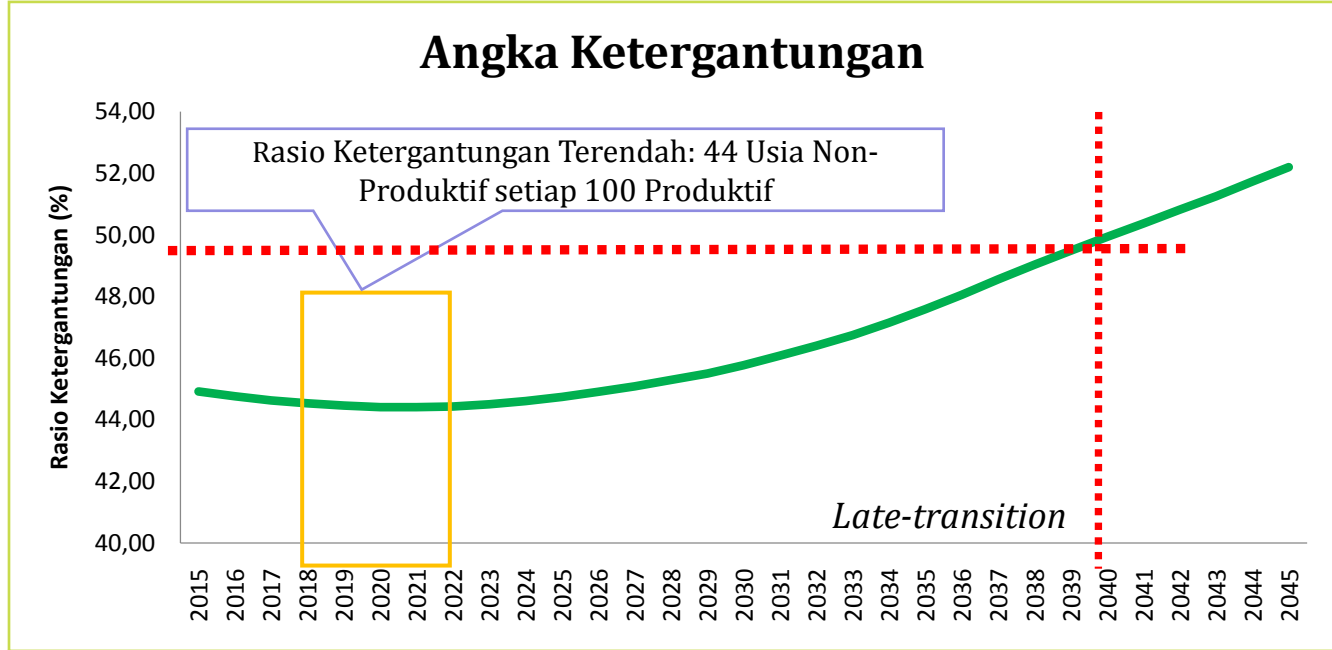
Secara spasial IPM terendah terdapat di Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, dan Kab. Bangka Tengah, sedangkan IPM tertinggi di Kota Pangkal Pinang 76,73

2
Kab. Bangka Barat
67,60 %

1
Kab. Bangka Selatan
64,57 %

3
Kab. Bangka Tengah
68,76 %

Kepulauan Bangka Belitung Mencapai Puncak Bonus Demografi Pada Tahun 2020



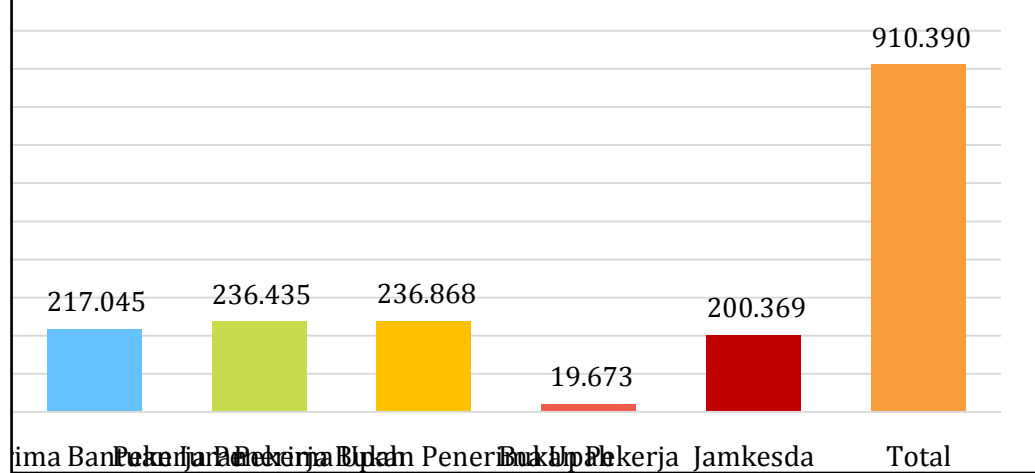
Isu kependudukan sebagai fundamental perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

1. Penyelesaian administrasi kependudukan
2. Perluasan kepesertaan SJSN pekerja informal

- Kepulauan Bangka Belitung sudah memasuki periode bonus demografi dan diperkirakan akan bertahan hingga tahun 2040.
- Bonus demografi dapat diraih dengan kebijakan yang tepat, sebagai berikut:
 - a. Memperluas kesempatan investasi
 - b. Memperluas kesempatan kerja dan peningkatan keahlian
 - c. Menjaga TFR di tingkat *Replacement Rate* (2,1)
 - d. Menurunkan IMR 3% setiap tahun

Cakupan Jaminan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masih Rendah

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 2017

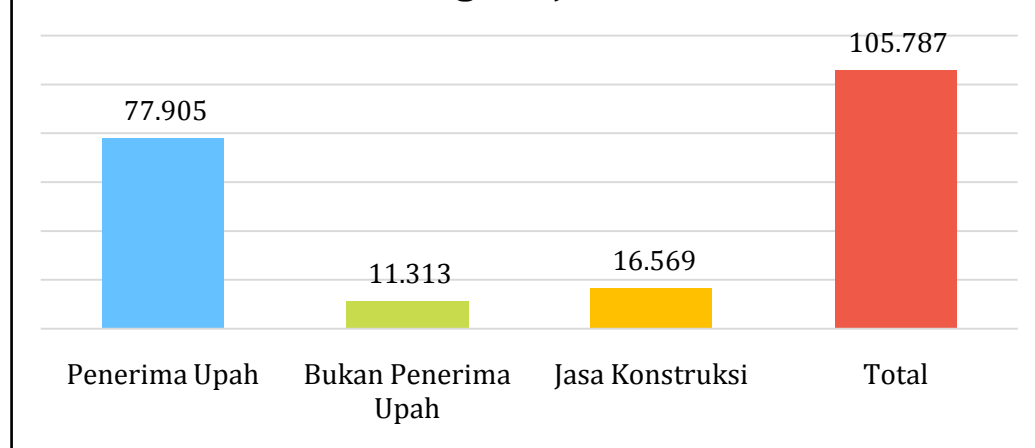


Sumber: BPJS Kesehatan

Isu strategis cakupan SJSN:

1. Cakupan JKN masih sekitar 64,4% penduduk
2. Kepesertaan sektor informal (PBPU) SJSN Ketenagakerjaan dan JKN masih sangat terbatas
3. Rendahnya kepesertaan SJSN terjadi pada seluruh tingkat ekonomi masyarakat

Kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2017



Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dan jaminan semesta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada 2019:

1. Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi pentingnya SJSN
2. Memperluas Penerima Bantuan Iuran melalui APBD bagi kedua program SJSN terutama bagi sektor informal pertanian dan perikanan

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Proyeksi Tahun 2019



**PERTUMBUHAN
EKONOMI:**

PROVINSI

5,34 %

NASIONAL

5,40 – 5,80 %



**TINGKAT
KEMISKINAN:**

PROVINSI

3,72 %

NASIONAL

8,50 – 9,50 %



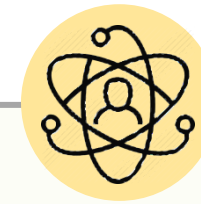
**TINGKAT
PENGANGGURAN:**

PROVINSI

3,44 %

NASIONAL

4,80 – 5,20 %



IPM:

PROVINSI

-

NASIONAL

71,98



GINI RASIO:

PROVINSI

-

NASIONAL

3,80 – 3,90

Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

- Jaminan Sosial Keluarga
- Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
- Bantuan pendidikan bagi siswa miskin / Siswa miskin yang mendapatkan bantuan
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang jaminan sosial tenaga kerja
- Pelaku HI yang mendapat pemahaman mengenai Jaminan Sosial

Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi

Masyarakat

- Pembinaan Kesehatan Keluarga
- Workshop bagi petugas imunisasi Fasyankes pemerintah dan swasta tingkat Kabupaten Bangka Barat
- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
- Penanggulangan masalah gizi kesehatan masyarakat

Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

- Pusat Kreativitas Anak
- Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
- Fasilitasi Sarana P2TP2A (MOLIN)
- Peningkatan Kapasitas Forum Anak



PN 1

Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

- Jaminan Sosial Keluarga
- Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
- Bantuan pendidikan bagi siswa miskin / Siswa miskin yang mendapatkan bantuan
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang jaminan sosial tenaga kerja
- Pelaku HI yang mendapat pemahaman mengenai Jaminan Sosial



PN 1

Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- *Pembinaan Kesehatan Keluarga*
- Workshop bagi petugas imunisasi Fasyankes pemerintah dan swasta tingkat Kabupaten Bangka Barat
- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
- Penanggulangan masalah gizi kesehatan masyarakat



Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

- Pusat Kreativitas Anak
- Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
- Fasilitasi Sarana P2TP2A (MOLIN)
- Peningkatan Kapasitas Forum Anak



PN 2

- Pengadaan Ice Flake 1,5 Ton
- Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Desa Tanjung Kelayang
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Seliuk dan Tanjung Nyato Tahap II
- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya (TPI Higienis)
- DED Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru

PN 3

- Kebun Bibit Rumput Laut
- Diversifikasi Bantuan Benih Ikan Air Laut
- Pengadaan benih Udang Vaname di 6 Kabupaten (Kab. Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur)
- Promosi Visit Wonderful Belitung
- Fasilitasi Pengembangan Sentra Inovasi dan Pusat Kreatif
- Fasilitasi Penerapan e-Commerce

PN 4

- Budiaya Sistem Bioflok termasuk Teknologi Anjuran yang diterapkan oleh Kelompok Masyarakat
- Kawasan Budidaya yang dilakukan pemetaan
- Kawasan Sentra/Kampung Nelayan yang Tertata dan Terintegrasi
- Pengelolaan Lahan Minapadi di 2 Kabupaten (Bangka Tengah dan Bangka Barat)
- Lumbung pangan masyarakat



PN 5

- Pengadaan kapal speedboat pengawas (diarahkan supaya diusulkan melalui mekanisme DAK)



Saat ini di Provinsi Bangka Belitung masih belum terdapat usulan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang akan dilaksanakan. Provinsi Bangka Belitung perlu mendorong untuk memanfaatkan peluang pembiayaan dalam pembangunan di daerahnya.

- Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan.
- Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Bangka Belitung perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah.
- Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan:
 - Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan).
 - Perkuatan integrasi pendanaan, baik antara Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBN) dengan APBD.

TERIMA KASIH